

# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap-new.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231

## **KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

Nomor: 12022090379

#### **TENTANG**

## PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMK BAHARI PAREPARE

#### **KEPADA**

## YAYASAN NURTFAINNA MAHJAB ABADI

#### **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala SMK Bahari Parepare Nomor:029/SMK,B/SP/I/D.4/VIII/2022 tanggal 09-08-2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:410.41/14417/SMK-DISDIK/2022 Tanggal 30 November 2022 dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang di Laksanakan Pada Tanggal 07 November 2022 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Bahari Parepare Layak Di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah pada Program Studi Keahlian Pelayaran Kapal Niaga, Kompetensi Keahlian Nautika Kapal Niaga, Program Studi Keahlian Kesehatan, Kompetensi Keahlian Keperawatan dan Farmasi, Program Studi Keahlian Teknik Ketenagalistrikan, Kompetensi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Program Studi Keahlian Akuntansi dan Keuangan, Kompetensi Keahlian Perbankan dan Keuangan Mikro:
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Bahari Parepare.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pedidikan nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagamana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahub 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221):
- Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- 6. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubajan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 26 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- 9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan:

Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 314/kep/I06/HK/98 Tanggal 13 Juli 1998 Tentang Persetujuan Penyelenggaran/Pendirian Sekolah Swasta Sekolah Menengah Kejuruan Bahari Parepare.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMK

BAHARI PAREPARE;

KESATU : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah : SMK BAHARI PAREPARE

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No.68 Kota Parepare

No. Telpon/HP : 082349879700

NPWP 95.619.469.0-802.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan

melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

berlaku

KETIGA : PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) Tahun terhitung sejak

ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana

mestinya;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 15 Desember 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.

Pangkat: PEMBINA UTAMA MADYA

Nip: 19630424 198903 1 010

#### Tembusan Yth

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatandi Makassar
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare
- 4. Kepala Cabang Wil.VIII Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 5. Ketua Yayasan Nurtfainna Mahjab Abadi
- 6. Kepala SMK Bahari Parepare
- 7. Pertinggal

#### NOMOR REGISTRASI 20220815111713



#### Catatan:

- $\bullet \ \ \text{UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 } \textit{Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. } \\$
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

